

Jurnal Ilmiah Postulate

Volume VI, No. 2 Bulan Agustus 2017

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Atas Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Aktifitas Pada Matahari Department Store & Hypermart Tahun 2012, 2013 & 2014
Oleh Syafruddin Siregar

Pengaruh Faktor Eksternal & Faktor Internal Terhadap Perkembangan Deposito Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri
Oleh Muhammad Amin

Pengaruh Jumlah Nasabah Shar-E & Dana Shar-E Terhadap Dana Pihak Ke-3 dan Pembiayaan Di Bank Muamalat Indonesia Periode 2004 – 2009
Oleh Herbudhi S. Tomo

Peranan Saluran Distribusi Dalam Menunjang Pemasaran
Oleh Siti Nuryati

Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif Karang Taruna Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
Oleh Amrul Natalsa Sitompul

Tinjauan Hukum Terhadap Serangan Virus *The Trojan Horse* Pada Internet Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penghancuran & Pengrusakan Barang Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Oleh Doddy Harrybowo Soekarno

Membangun Karakter Anak Bangsa Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal
Oleh Hamsah



Creating Bright Futures

UNIVERSITAS AZZAHRA



Creating Bright Futures

**Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif Karang Taruna
Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat**

Oleh Amrul Natalsa Sitompul⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan dari Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif Karang Taruna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, subjek penelitian ini adalah anggota karang taruna yang ada di wilayah Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang berjumlah 45 orang. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket dengan analisis data menggunakan rumus interval dan persentase. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian adalah pengurus, anggota dan tokoh masyarakat yang terkait dengan program. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan dalam keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dari Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif Karang Taruna serta peranan karang taruna di tengah masyarakat, yaitu usaha kesejahteraan bersama, pemberdayaan masyarakat, dengan pengembangan semangat kebersamaan dan pemupukan kreativitas generasi muda, adalah berada pada kategori kurang baik. Hal ini berarti pemuda yang kurang memiliki sikap tanggap, dan peduli pada lingkungan sekitar sehingga mereka lupa dengan tugasnya sebagai pemuda dan anggota karang taruna. Faktor penghambatnya yaitu konsistensi anggota yang belum mau diajak berkembang, modal bergilir yang sempat mengalami kendala dan kesibukan masing-masing pengurus dan anggota. Oleh sebab itu pemuda diharapkan untuk dapat lebih peduli dengan lingkungan sekitar melalui Karang Taruna di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 83/HUK/2005.

Kata Kunci: karang taruna, kepedulian sosial, pemberdayaan pemuda, ekonomi produktif

⁵ Amrul Natalsa Sitompul, Drs. M.Si adalah Dosen DpK KOPERTIS wilayah III DKI Jakarta, juga selaku Kaprodi Administrasi Negara FISIP Universitas Azzahra.



Creating Bright Futures

PENDAHULUAN

Kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan merupakan masalah yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan mengentaskan persoalan diatas. Hal ini merupakan akibat/dampak dari keadaan ekonomi yang tidak menentu, kurangnya lapangan kerja serta pendapatan masyarakat yang rendah. Kelompok yang paling menderita bukanlah mereka yang menikmati kredit, tetapi mereka yang tingkat hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, dan mereka yang kemampuan ekonominya menurun akibat pemutusan hubungan kerja sehingga menjadi hidup di bawah garis kemiskinan, serta mereka yang mempunyai usaha-usaha kecil yang pendapatannya menurun akibat kenaikan harga bahan-bahan baku.

Pemerintah menyadari bahwa untuk menolong dan melindungi kelompok masyarakat miskin dengan pemberian bantuan tidak akan memadai bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan suatu proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan. Dalam upaya itu semua, pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha mengembangkan usaha ekonomi produktif dan penyediaan prasarana yang menunjang terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat pinggiran perkotaan, juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan

pengambilan keputusan yang demokratis, baik itu dari segi perencanaan program, pelaksanaan program dan pada saat pelestariannya. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung pada tiga rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat akan punya rasa memiliki dan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Hal seperti ini merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat yang juga disertai dengan proses pemberdayaan pada lembaga dan aparat baik yang berada ditingkat Kelurahan atau kecamatan guna lebih menyukseskan program tersebut pemerintah dengan melibatkan organisasi kepemudaan di tingkat Kelurahan atau Kecamatan, salah satunya adalah karang taruna. Karang taruna sebagai wadah dan wahana peran dan partisipasi bagi generasi muda yang bergerak pada usaha kesejahteraan sosial, dan yang diarahkan pada upaya manifestasi pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam.

Karang Taruna sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 83/HUK/2005 Pasal 1 yang berbunyi: "Karang taruna adalah wadah pembinaan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah perkotaan pinggiran atau kumuh dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial". Memperhatikan pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa Karang taruna



merupakan wadah generasi muda untuk menjadikan dan mengabdikan diri melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial, guna terciptanya kemandirian dan membuat perubahan-perubahan tata nilai sosial kearah pembaharuan dan pembauran, baik secara fisik material maupun mental spiritual.

Dari berbagai uraian tersebut diatas, mengisyaratkan betapa strategisnya keberadaan Karang taruna bagi masyarakat perkotaan. Jadi agar semuanya berlangsung secara berkesinambungan dan mencapai hasil yang optimal, maka faktor yang paling mendukung dari pelaksanaan karang taruna adalah adanya partisipasi dari semua elemen masyarakat. Adanya partisipasi dari masyarakat Kelurahan dari setiap program dari Kelurahan Bungur, menjadi cermin yang positif tentang kesadaran yang tinggi dari masyarakat sekitar terhadap pemberdayaan masyarakat secara swadaya dan mandiri kelak.

PERMASALAHAN

Karang Taruna merupakan organisasi sosial generasi muda yang bersifat kewaspadaan, kebersamaan dan berdiri sendiri serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, karang taruna memiliki tugas pokok bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial khususnya dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat

di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Berangkat dari uraian diatas maka dalam penulisan ini difokuskan perhatian pada upaya mencari pemecahan terhadap masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi produktif Karang Taruna di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat.
2. Faktor-faktor apa yang menjadikan kendala pada pola pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi produktif Karang Taruna di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat.
3. Mengapa pola pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi produktif Karang Taruna belum berjalan secara optimal.

Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Karena itu penelitian ini berupaya menjelaskan tentang realita pola-pola pembinaan pada Disosnakertrans dalam pemberdayaan ekonomi produktif karang taruna. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan



dokumen (Denzin & Lincoln, 1987).

Berdasarkan penjelasan diatas jenis penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau study kajian dengan menggunakan metode deskriptif. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Menurut Nasir "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diteliti secara mendalam terhadap suatu objek yang dipilih secara beberapa keadaan yang dianggap sama". Pada penelitian ini didasarkan pada data-data yang berbentuk tabel dan analisis menjelaskan keadaan objek penelitian sebagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian ini maka sumber data adalah *key informan*, informasi awal di pilih secara purposif (*purposive sampling*). Ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan menguasai permasalahan, sehingga data yang di peroleh benar-benar dapat digunakan dan sesuai yang

diharapkan. Untuk keperluan tersebut, maka peneliti mengelompokkan dua jenis data berdasarkan cara perolehannya, yaitu :

A. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data utama tanpa adanya perantara, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
2. Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
3. Kepala Kelurahan dan perangkatnya,
4. Ketua karang taruna,
5. Tokoh masyarakat / pemuka masyarakat,
6. Peserta pembinaan ketrampilan menjahit di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat

B. Data Dokumen diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang memuat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian baik dari situs penelitian yang ada maupun dari Undang-undang.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat dengan beberapa pertimbangan : Secara geografis Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, merupakan salah satu daerah pembinaan ekonomi Produktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota administratif Jakarta Pusat.



Creating Bright Futures

1. Kegiatan Karang taruna di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat berjalan dengan relative baik utamanya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Peneliti ingin lebih mengetahui tentang peranan karang taruna dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan (*Empowering*) Menurut Suharto (2006: 57) "Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*Power*" (kekuasaan atau keberdayaan)". Sedangkan menurut (Kartasasmita, 1996:54) Pemberdayaan atau *empowerment* berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari "dalam" yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari "luar".

Dalam pengertian ini konsep pemberdayaan mempunyai arti sama dengan *empowerment*. Jika mengacu pada asal kata dari pemberdayaan dan memberdayakan yang berasal dari kata *empowerment* dan *empower*, menurut *Merriam Webster* dan *Oxford English Dictionary* (dalam Prijono dan Pranarka, 1996:96) artinya *to give power or utority to*, serta *to give ability to or enable*. Dimana pengertian pertama mengandung makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain, sedangkan pengertian yang kedua

mengandung makna sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Karenanya, pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks



relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna, dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut *Life* dalam Suharto (2006:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- ♣ Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup ; kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- ♣Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- ♣Ide atau gagasan ; kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

- ♣Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- ♣Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informasi dan kemasyarakatan.
- ♣Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- ♣Reproduksi ; kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu



menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para

penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai 'deviant' (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat adanya kekuranganadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Berger dan Nenhaus dan Nisbet dalam (Suharto, 1997:254), 'struktur-struktur penghubung' (*Mediating structure*) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah.

Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan *mobile* telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas. Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan (mesjid, gereja), dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, seringkali system ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik,



selain di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga tidak jarang semakin meminggirkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Suharto, Ada beberapa penyebab adanya ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- Ketidakberdayaan jaminan ekonomi
- Ketiadaan pengalaman dalam arena politik
- Ketiadaan akses terhadap informasi
- Ketiadaan dukungan finansial
- Ketiadaan pelatihan-pelatihan
- Adanya ketegangan fisik maupun emosional

Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian. Seeman menyebut keadaan ini dengan istilah 'alienasi'.

Sementara Seligman menyebutnya sebagai 'ketidakberdayaan yang dipelajari' (*Learned helpness*), dan Leaner menamakannya dengan istilah 'ketidakberdayaan surplus' (*surplus powerlessness*) Konsep 'ketidakberdayaan' ini sebagai proses dengan mana merasa tidak berdaya melalui pembentukan seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya ada.

Sebagai contoh, para penerima Bantuan Sosial Keluarga merasa tidak berdaya untuk merubah program dan bentuk-bentuk pelayanan AFDC. Mereka memiliki persepsi bahwa dirinya tidak mampu, tidak berdaya, atau bahkan tidak berhak untuk merubah program-program tersebut. Menurut Kiefer (1984:9), ketidakberdayaan yang dipersepsi ini merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungannya yang meliputi kombinasi antara sikap penyalahan diri sendiri, perasaan tidak percaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik.

Melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negatif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blockade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar (Suharto, 1997:213-214).

Penilaian diri yang negatif

Ketidakberdayaan dapat berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk akibat adanya penilaian negatif dari orang lain. Misalnya wanita atau kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka telah disosialisasikan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan setara dalam masyarakat. Interaksi negatif dengan orang lain. Ketidakberdayaan dapat bersumber



dari pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang tertindas dengan system di luarmereka yang menindasnya. Sebagai contoh, wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini kemudian menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial di mana mereka berada.

Faktor Lingkungan

Lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekspresikan atau menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas suku agama tertentu dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Parsons (1994:112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setiap pertolongan perseorangan.

Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun

demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, krisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial,



lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Strategi system besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Seperti yang diungkapkan oleh Kartasasmita (1996:86) bahwa pada hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia sedangkan faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus saja. Perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat (Sumodiningrat, 1997:41).

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemberdayaan masyarakat menurut Friedmann (1992:12) tidak hanya sebatas ekonomi saja, tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar baik secara nasional maupun internasional. Proses pemberdayaan bisa dilakukan terhadap individu maupun kelompok, namun pemberdayaan kelompok mempunyai keunggulan karena mereka dapat

saling berdialog untuk saling menyadari dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Bahkan diakui bahwa pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan karena di rumah tangga terdapat tiga kekuatan yaitu sosial ekonomi, politik dan psikologis.

Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Untuk itu para kelompok masyarakat tersebut dapat "bangun" dan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mampu mengejar ketinggalannya dari saudara-saudaranya yang lain diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui tiga arah/jurusan antara lain : melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun melalui perlindungan terhadap yang lemah, agar tidak menjadi semakin lemah oleh karena kurang berdayaan dalam masyarakat yang kuat.

Untuk itu dalam menciptakan suasana masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan secara langsung kepada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses



pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisiketerbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi. Mengutip pendapat Kartasmita pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri antara lain :

1. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah.
2. Pelaksanaannya harus dilakukan oleh masyarakat sendiri dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan.
3. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang-berdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperative*) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal,
4. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya.

Selain proses pentahapan yang selalu dipaparkan di atas pemberdayaan juga membutuhkan suatu pendekatan utama dalam masyarakat dimana masyarakat tidak boleh dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi juga merupakan subyek

dari pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan merupakan proses pematahan (*break down*) dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antara subyek dengan obyek yang lain atau dengan kata lain, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek obyek menjadi subyek-subyek.

Menurut Islamy (2003:20) kebijaksanaan Negara (*public policy*) itu adalah "serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Sedangkan Raymond dalam William N. Dunn (2000:1) Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta berlaku dalam suatu Negara pada umumnya. Setiap kebijakan Negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Konsep tentang Karang Taruna sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 83/HUK/2005 Pasal 1 yang berbunyi : "Karang taruna adalah wadah pembinaan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan



Creating Bright Futures

rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah perkotaan pinggiran atau kumuh dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. sedangkan salah satu tujuannya (Pasal 2 poin f) adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di tingkat Kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosial sebagai manusia-manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Dari pengertian dan tujuan ini, semakin memperjelas bahwa pada hakekatnya optimalisasi peran dan partisipasi karang taruna di perkotaan pinggiran atau kumuh diperlukan dan strategis dalam upaya menjembatani kepentingan generasi muda ke arah pemberdayaan kesadaran dan tanggung jawab sosial guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat.

Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan (Ekonomi) akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan perandalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri

keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelolanya. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dicirikan oleh perilaku, Imtaq, oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama serta adat dan budaya.

Pengembangan kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya yang ada memerlukan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya tidak menyebabkan kerusakan sumber daya yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus dimulai dengan identifikasi potensi dan permasalahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan infrastruktur yang mendukung. Generasi muda telah mendapatkan banyak pelajaran dalam hal pentingnya peningkatan dalam perubahan baik secara fisik-material maupun mental-spiritual dalam memainkan peranannya ditengah-tengah kehidupan sosial yang beranekaragaman pilihan, *culture, view*, perilaku dan lain-lainnya. Karena kakuatan distribusi terhadap suatu peningkatan dan perubahan perubahan yang diharapkan, membawa dampak nilai-nilai tanah dan bangunan (Sumber daya alam dan sumber daya manusia), dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda dan baru.

Hal tersebut tentu membutuhkan kemampuan dan penyesuaian orang-orang dan berbagai keperluan yang dibutuhkannya, sehingga menjadikan tatanan nilai yang senantiasa berubah dan meningkat, ke arah perubahan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, sebab perubahan-perubahan



Creating Bright Futures

yang meningkat atas penggunaan-penggunaan sumber daya dan produk-produk yang dihasilkan dari suatu pekerjaan, membawa dampak pada ekonomi kegiatan-kegiatan yang dibawahnya.

Berkenaan dengan pandangan diatas, dan jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai suatu upaya yang diharapkan, maka upaya yang paling tepat adalah pembinaan. Pembinaan yang berindikasikan keterkaitan dalam proses pembangunan dapat terlihat dalam kegiatan-kegiatan kelompok kerja yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pada kepentingan pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, upaya pembinaan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dapat diuraikan bahwa, "Pembangunan kualitas pribadi sebagai sumber daya manusia, meliputi kualitas fisik, mental/rohani dan kemampuan. Jadi pada hakekatnya, upaya pembinaan dalam peningkatan kualitas masyarakat meliputi :

1. Meningkatkan penerapan manajemen organisasi.
2. Menumbuhkembangkan kader-kader yang profesional.
3. Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
4. Peningkatan, pengembangan dan kemampuan program kegiatan.

Artinya, dengan upaya pembinaan tersebut, diharapkan adanya pemuda sebagai kader-kader pelaksanaan pembangunan yang memiliki :

- a. Tingkat kualitas fisik yang dapat didayagunakan (sehat jasmani), sehingga dapat memaksimalkan kontribusi kerja.
- b. Tingkat kualitas mental/rohani yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggungjawab, disiplin, dan berbudi pekerti serta sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Tingkat kualitas kemampuan yang memiliki kecerdasan dan kreativitas keahlian dan keterampilan yang professional.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kualitas pemuda yang tergabung dalam wadah karang taruna, bisa ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

- a. Tingkat aktivitas kegiatan organisasi karang taruna.
- b. Tingkat kemampuan dan keterampilan anggota dan pengurus karang taruna.
- c. Tingkat intensitas keanggotaan karang taruna.

Dengan demikian, akan dapat diketahui nilai kualitas pemuda (Sebagai stensil pasif dan aktif) dalam memainkan peran dan tujuannya. Apabila anggota pasif, aktif dan pengurus ternyata mampu melakukan kegiatan dan kerjasama secara terus-menerus dan berkesinambungan serta sesuai dengan yang telah diprogramkan, berarti peran positif pada masyarakat atau pembangunan, yang berarti pula adanya peningkatan kualitas terhadap keberadaan pemuda, namun begitu juga



Creating Bright Futures

sebaliknya, sehingga kemampuan pemuda sebagai anggota/pengurus dapat terukur, baik tingkat aktivitas, kreativitas dan keterampilan yang dimiliki (seperti kegiatan pelatihan, kursus, usaha ekonomi produktif dan lain sebagainya) terhadap keberadaan organisasi "Karang taruna" itu sendiri dan lingkungannya. Kemudian daripada itu peningkatan kualitas pemuda dalam wadah karang taruna dimaksud, dapat dilihat dari jumlah kader-kader kepemimpinan yang ada yang dihasilkan. Selain itu dapat pula dilihat dari jumlah keanggotaan dan rekrutmen keanggotaan baru yang tergabung dalam karang taruna.

Kepedulian generasi muda terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya, mampu memperkuat *self motivated*. Tujuannya agar karang taruna sebagai wadah dan wahana perjuangan ke arah usaha kesejahteraan sosial, tidak hanya bergerak pada pengisian waktu luang untuk berperan. Namun peran dan fungsinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat pinggiran perkotaan perlu ditingkatkan. Untuk dijadikan sebagai motor bagi generasi muda dalam memainkan peran aktif dan kontribusinya pada pembangunan wilayah. Sebab potensi karang taruna pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi Kelurahan, yang berintikan kekuatan yang cukup strategis, seperti:

a. Anggota karang taruna merupakan anggota-anggota yang secara potensial masih sangat produktif.

- b. Anggota-anggota karang taruna berasal dari wilayah Kelurahan setempat, sehingga karang taruna dianggap sangat memahami potensi kewilayahan.
- c. Anggota-anggota karang taruna diasumsikan sangat besar jumlahnya sehingga secara kuantitatif dapat dikembangkan menjadi potensi yang dinamik, yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi perdesaan.
- d. Generasi muda Kelurahan dianggap cukup responsive menerima perubahan-perubahan dalam era globalisasi pada saat ini.

Oleh karena itu, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemuda untuk dapat tumbuh dan berkembang maju (rohani, jasmani, kreasi, inovasi), perlu adanya peningkatan kualitas. Sejalan dengan ini, maka perlu adanya berbagai macam upaya dan program kegiatan untuk membina dan meningkatkan kualitasnya. Sehingga bisa mampu berperan aktif, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarga, orang lain atau masyarakat, institusi pemerintah maupun swasta, guna terciptanya suasana yang kondusif sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pemuda.

Karang taruna merupakan penggerak, pendorong serta upaya guna menyiapkan para remaja/generasi muda, agar mampu melaksanakan peranannya sebagai penerus perjuangan bangsa serta sebagai sumber insani pembangunan nasional yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Karang taruna mempunyai



peran sebagai penggerak dan pendorong serta upaya melakukan dan penyiapan para pemuda sebagai kader perjuangan yang berkualitas dan mampu menggunakan pola penerapan manajemen yang handal dan professional, sehingga bisa menjembatani peran aktif kearah peningkatan kualitas pemuda dalam segala segi dan implementasinya.

Deskripsi Hasil Penelitian

Perubahan paradigma baru mengakibatkan terjadinya perubahan di Indonesia dimana telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistik ke arah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan nyata pada daerah.

Pemberian ini dimaksudkan khususnya untuk lebih memandirikan daerah serta memberdayakan masyarakat di daerah. Salah satu hal penting adalah dalam penanganan kegiatan sosial melalui pelaksanaan otonomi daerah yang sudah mulai di gulirkan sejak tanggal 1 Januari 2000 dimana dalam hal ini telah ditangani Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi daerah. Dengan perubahan ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan perintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi dimana masyarakat .

Sumber-sumber pendapatannya mampu

menetapkan belanja daerah secara ekonomis, wajar, efisiensi dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya itu kepada atasannya maupun kepada publik/masyarakat. Hal penting yang perlu mendapat perhatian segenap pelaku pemerintahan bagaimana meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu cara peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu program dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kehidupan sosial masyarakat dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri jadi masyarakat diberdayakan untuk bisa mencari kehidupan sendiri yantu dengan jalan di beri ketrampilan sebagai bekal nanti ketika terjun ke masyarakat. Sebagaimana dikemukakan kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di atas bahwa pemberdayaan bukan hanya memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan. Sehingga masyarakat bisa mandiri tanpa tergantung pada orang lain.

Dalam melakukan pembinaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlebih dahulu melakukan pembekalan kepada para peserta. Memaparkan tujuan yang ingin dicapai serta implementasi tujuan tersebut



sehingga tepat sasaran. Pembekalan di harapkan para peserta yang mendapat pembinaan bukan hanya sekedar dapat kemudian setelah itu selesai, akan tetapi akan memberikan tindak lanjut yang berkelanjutan sehingga masyarakat khususnya pemuda yang mendapat pembinaan akan menjadi masyarakat mandiri yang mampu berkembang sesuai keterampilan yang dimilikinya.

Demikian halnya yang di ungkapkan sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, menyatakan: "Program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi produktif karang taruna yaitu dengan cara melakukan pembinaan kepada para pemuda potensial dengan memberdayakan kemampuan serta keahlian yang dimiliki sehingga mempunyai daya produktivitas yang tinggi disamping itu, dinas sosial nakertrans memberikan bantuan stimulasi berupa peralatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh: untuk usaha keterampilan menjahit akan dibantu dengan alat berupa mesin jahit".

Bantuan stimulus ini dilakukan dengan tujuan memberikan rangsangan kepada para pemuda agar lebih meningkatkan skill dan kreativitas kerja mereka. Demi meningkatkan hasil kerja yang maksimal maka dinas sosial nakertrans dalam pembinaannya mengadakan program pelatihan kerja bagi para pemuda. Pelatihan kerja ini dilaksanakan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kemampuan produktivitas

yang maksimal. Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan pembangunan nasional, khususnya mengenai masalah ekonomi kerakyatan. Seiring dengan terpuruknya perekonomian nasional yang sangat dirasakan oleh bangsa kita maka perlu dilakukan pemberdayaan-pemberdayaan, salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Pemberdayaan ini dilakukan guna memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga menjadi tambahan penghasilan yang dapat menambah pendapatan perekonomian mereka. Di tengah badai krisis yang melanda bangsa kita saat ini diperlukan peranan pemerintah melalui dinas sosial nakertrans dalam mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan, keterbelakangan menjadi masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Program Dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak selamanya berjalan dengan mulus namun terdapat beberapa kendala seperti yang di kemukakan Kepala seksi Bina Swadaya Sosial menyatakan : "Beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Terbatasnya anggaran ini menjadi kendala



terhadap pelayanan bagi masyarakat karang taruna. Karang taruna merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang ada di tingkat Kelurahan”.

Hal senada dikemukakan Kepala seksi Rehabilitasi Sosial yang menyatakan: “Disamping kurangnya anggaran kurangnya respon dari warga karang taruna dalam rangka memajukan organisasi yang ada tengah masyarakat masih terdapat kekurangan. Kemajuan organisasi kepemudaan seperti karang taruna dibutuhkan peran serta pemuda dan aparatur kelurahan untuk bersikap produktif dalam menunjang kemajuan Kelurahan tersebut sehingga ketika ada program pemberdayaan organisasi yang di bawah akan siap dalam setiap pelaksanaannya”.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan ekonomi produktif karang taruna perlu dilakukan berbagai tindakan untuk mengatasinya. Langkah-langkah yang harus diambil oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi perlu mengadakan penyuluhan ke tiap-tiap Kelurahan, memberikan bimbingan serta pembinaan kepada masyarakat karang taruna, guna mendukung terhadap kemajuan bagi karang taruna itu sendiri. Kemajuan karang taruna ditingkat Kelurahan sangat tergantung kepada manajemen yang ada. Maka dari itu, motivasi kerja perlu dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dengan cara

mengadakan lomba karang taruna yang diikuti seluruh Kelurahan se-DKI Jakarta.

Dari berbagai program yang dilakukan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat seperti yang di kemukan Ketua Karang Taruna Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat menyatakan: “Manfaat yang diperoleh dari program pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi karang taruna yang dibina oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi yaitu dapat menyaring para pemuda potensial, generasi muda potensial ini merupakan asset bangsa yang harus diberdayakan. Maju tidaknya Negara kita tergantung dari generasi mudanya karena generasi muda adalah tulang punggung suatu Negara”.

Secara demografi, Negara kita sangat diuntungkan dengan jumlah usia produktif yang sangat besar. Besarnya usia produktif ini menjadi modal utama bangsa kita untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi terhadap para pemuda melalui lembaga karang taruna merupakan langkah-langkah kongkret yang dapat menunjang peningkatan mutu sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dengan posisi geografis yang sangat strategis yaitu berada diposisi silang lalu lintas dunia. Dengan posisi yang strategis dan ditopang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dibutuhkan sumber daya



manusia yang bermutu untuk mengelola sumber daya alam yang kita miliki.

Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat memberikan dampak yang sangat baik bagi warga karang taruna, khususnya dalam peningkatan kualitas kerja. Peningkatan kualitas kerja warga karang taruna memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan karang taruna. Kemajuan karang taruna dapat diwujudkan dengan maksimalnya kinerja warga karang taruna. Peran serta para pemuda, pengurus dan aparatur Kelurahan yang sangat mendukung terhadap kemajuan karang taruna itu sendiri. Dengan majunya karang taruna di Kelurahan membuka peluang lapangan pekerjaan kepada warga karang taruna sehingga pengangguran dapat teratasi.

Guna lebih mendukung pemberdayaan masyarakat juga turut serta berpartisipasi dalam mendukung program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti yang dikemukakan oleh Lurah Bungur Bapak Aruwanto, SE, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat, menyatakan: "Guna mendukung program dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kelurahan yaitu memfasilitasi kepada pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Tersedianya fasilitas baik sarana maupun prasarana sangat menunjang terhadap

keberhasilan program pembinaan yang dilakukan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi". Demikian yang diuraikan oleh Lurah Bungur Kecamatan Senen, kota Administratif Jakarta Pusat dalam suatu kesempatan.

Motivasi juga harus dilakukan oleh pihak Kelurahan guna memberikan semangat kepada para pemuda untuk lebih berpartisipasi dalam mensukseskan program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Kesuksesan program pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna merupakan kesuksesan bersama. Hasil yang didapat dalam pemberdayaan masyarakat akan memberikan dampak yang nyata sebagai bekal dalam kehidupan nanti seperti yang di kemukakan salah seorang yang peserta pembinaan menyatakan: "Program pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomis produktif karang taruna memberikan dampak yang sangat baik kepada para peserta. Peningkatan keterampilan dan kreativitas kerja peserta dapat menciptakan tenaga handal dan berpotensi tinggi. Dengan berbekal pengetahuan, keterampilan dan pengalaman para peserta dapat menciptakan lapangan kerja untuk memperbaiki kehidupannya".

Langkah-langkah yang diambil oleh para peserta setelah program pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif



Creating Bright Futures

karang taruna usai adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi para pemuda dapat mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga kehidupan sosial masyarakat akan lebih baik. Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan.

Dewasa ini, arus urbanisasi menjadi masalah yang patut diperhitungkan oleh pemerintah karena dampak yang dirasakan oleh Kelurahan adalah hilangnya tenaga kerja potensial. Kurangnya tenaga kerja potensial ini dapat menghambat terhadap laju pembangunan di Kelurahan. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama masyarakat Kelurahan. Terciptanya lapangan pekerjaan dan pembinaan bagi para pemuda potensial di Kelurahan merupakan alternative yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya.

PEMBAHASAN

Memperhatikan dari beberapa uraian pemikiran atau teoritis yang terdapat dalam bab pendahuluan, kajian pustaka dan metode penelitian, serta setelah dihubungkan dengan temuan penelitian, maka dipandang perlu

penulis untuk memberikan penekanan pembahasan bahwa bagaimana pola pembinaan Disosnakertrans dalam pemberdayaan ekonomi produktif karang taruna pada obyek penelitian yakni di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan kehidupan masyarakat dengan pendapatan yang belum merata dengan berbagai perbedaan akan mewarnai kehidupan sehari-hari. Keberagaman dalam masyarakat dengan tingkat perbedaan yang tinggi menuntut adanya keterbukaan dan toleransi yang tinggi dari seluruh anggota warganya.

Kepentingan dari masing-masing individu dan kelompok masyarakat harus dapat saling menghargai dan diterima sebagai sesuatu yang baru. terpenting bahwa perbedaan dapat dijadikan pemikiran untuk diselaraskan dalam suatu kesamaan sikap sehingga tertuju ke jalan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat pada dasarnya adalah pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak yang lebih besar kepada si miskin, pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan kepada orang tersebut kebebasan untuk mempertanggungjawabkan idenya, keputusan dan tidakannya.

Pemberdayaan bukan hanya memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber daya masyarakat dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari



cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang komprehensif. Pada dasarnya bahwa setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya.

Pada hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia sedangkan faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus saja. Perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang merupakan memapukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan muncul karena adanya kegagalan pada model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan sebagai konsep alternative pembangunan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan

pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja, tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar baik secara nasional maupun internasional. Proses pemberdayaan bisa dilakukan terhadap individu maupun kelompok, namun pemberdayaan kelompok mempunyai keunggulan karena mereka dapat saling berdialog untuk saling menyadari dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Bahkan diakui bahwa pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan karena di rumah tangga terdapat tiga kekuatan yaitu sosial ekonomi, politik dan psikologis. Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Untuk itu para kelompok masyarakat tersebut dapat "bangun" dan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mampu mengejar ketinggalannya dari saudara-saudaranya yang lain diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui tiga arah/jurusan antara lain: melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat



maupun melalui perlindungan terhadap yang lemah agar tidak menjadi semakin lemah oleh karena kurang berdayaan dalam masyarakat yang kuat.

Dalam rangka menciptakan suasana masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan secara langsung kepada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi. Arah pemberdayaan masyarakat di atas berpangkal pada dua sasaran utama yaitu: melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi pembangunan prasarana dasar dan menciptakan keterkaitan Kelurahan yang harmonis dan terpadu. Hal ini berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Berarti setiap anggota masyarakat diisyaratkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan yang sama dan bertindak rasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, memiliki kapasitas ekonomi, mandiri dan memiliki kemampuan untuk memiliki *power*.

Agar sampai pada sasaran di atas maka dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pertahapan yaitu:

- (1) Dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat,
- (2) Dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat,
- (3) Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dimana pada tahap ketiga di atas masyarakat sudah dapat menentukan eksistensinya sehingga dapat melakukan pembaharuan -pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya.

Pemberdayaan masyarakat tersebut mencapai puncaknya ketika ada pada fase ketiga yaitu emansipatif, dan untuk dapat merealisasikannya dibutuhkan dua prasyarat pokok yaitu perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pembangunan. Perencanaan pembangunan yang mempunyai ciri pemberdayaan masyarakat adalah yang mengarah pada strategi-strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi ini menurut memiliki tiga arah yaitu:

- (1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat,
- (2) Pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat,
- (3) modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial



ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri antara lain kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah, pelaksanaannya harus dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dapat dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan, karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurang-berdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pengembangan kegiatan usaha bersama dalam kelompok yang dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal.

Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat, untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya. Selain proses pentahapan yang selalu dipaparkan di atas pemberdayaan juga membutuhkan suatu pendekatan utama dalam masyarakat dimana masyarakat tidak boleh dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi juga merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan merupakan proses pematangan dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya

akan dicirikan dengan relasi antara subyek dengan obyek yang lain atau dengan kata lain, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek obyek menjadi subyek-subyek.

Berdasarkan hal tersebut di atas dikembangkan berbagai pendekatan yang menurut Ginanjar Kartasmita (1996) mungkin dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Upaya pemberdayaan masyarakat terarah (targeted) atau pemihakan kepada yang miskin/lemah.
2. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama.
3. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan pembentukan kelompok masyarakat miskin yang dilakukan oleh pendamping (Pendamping local, teknis dan khusus) ia berfungsi sebagai fasilitator, komunikator ataupun dinamisator serta membantu kelompok mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Pada hakekatnya pemberdayaan berada



pada diri manusia sedangkan faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus saja untuk memancing daya kreativitas pada diri individu itu sendiri.

2. Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna merupakan wadah pembinaan pada para pemuda untuk memancing daya kreativitas diri yang akan menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif Jakarta Pusat, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Mengingat bahwa pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna merupakan menimbulkan dampak positif bagi pemuda khususnya dan masyarakat umumnya, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih meningkatkan pembinaan kepada masyarakat khususnya pada pemuda di tingkat kelurahan guna meningkatkan ketrampilan mereka sebagai bekal hidup di masyarakat.
2. Guna lebih meningkatkan kreativitas pemuda Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dapatnya lebih meningkatkan program-program ketrampilan berwirausaha, khususnya ketrampilan yang mengarah kepada ekonomi kreatif mandiri yang disesuaikan

dengan kemajuan zaman seperti ketrampilan komputer dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Marzuki. 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta:BPFE, Universitas Islam Indonesia
- Dunn, William N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedmann, John. 2002, *Empowerment: The Politic Of Alternatif Development*, Chambrige: Bllackwell
- Gunawan Sumodiningrat. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta: PT Gramedia
- Islamy, Irfan, 2002, *Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara
- Koentjoroningrat, (ED), 1991, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komarudin, 2004, *Kamus Istilah Skripsi Dan Thesis*, Bandung: Penerbit Angkasa
- Louise, G White and Carolin Bryant, 1997, *Negara Manajemen Pembangunan Untuk Berkembang*, Jakarta, LP3ES
- Moleong, Lexy J. 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasir, Muhammad. 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: BPFE UII
- Parsons, W, 1997, *Public Policy: An Introduction To The Theory and Praticice Of Policy Analysis*, United Kingdom: Cheltenham Press
- Prijono, Lyme dan AMW Pranarka, Onny S. (Ed)., 2006, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS
- Suharto, Edi, 2007, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP_STKS)
- _____, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Rafika Adi Tama